

**ANALISIS FUNGSIONAL TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
PU SINDOK PADA ABAD KE-10 M**

Functional Analysis of Pu Sindok's Government Policy in the 10th Century AD

Hari Fitria Utama dan Arif Subekti

Universitas Negeri Malang

Jalan Semarang No. 5, Kota Malang, 65145, Indonesia

Pos-el: hari.fitria.1907316@students.um.ac.id

Naskah diterima: 25 Januari 2023 – Revisi terakhir: 30 Juni 2023

Disetujui terbit: 30 Juni 2023

Abstract

*Many inscriptions from Pu Sindok's reign (929–948) can be discovered across eastern Java. The researchers have found 23 inscriptions with year dates that detail the laws that were in effect under Pu Sindok's rule. Policies are written in the inscriptions as *sima makudur* and *sima punpunan*. Because there are so many sources in these inscriptions, it is possible to recreate historical events under Pu Sindok's reign and assess his implemented policies. This article uses Robert K. Merton's functional analysis to examine Pu Sindok's policies. The outcomes of this article's descriptive qualitative research techniques and *astabrata* parameters are the manifest, latent, and dysfunctional functions of Pu Sindok's policies.*

Keywords: *Pu Sindok; functional analysis; policies*

Abstrak

Masa pemerintahan Pu Sindok (929--948 M) banyak meninggalkan prasasti yang tersebar di Jawa bagian timur. Telah ditemukan 23 prasasti berangka tahun yang memuat kebijakan selama Pu Sindok menjabat. Prasasti tersebut memuat kebijakan berupa *sima makudur* dan *sima punpunan*. Rekonstruksi sejarah pada masa Pu Sindok dapat dilakukan dengan baik karena melimpahnya sumber primer berupa prasasti, sehingga dapat dilakukan analisis mengenai kebijakan yang diterapkan selama masa pemerintahannya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pu Sindok dengan menggunakan analisis fungsional Robert K. Merton. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan parameter *astabrata*, hasil dari artikel ini adalah fungsi manifes, fungsi laten, dan disfungsi dari kebijakan Pu Sindok.

Kata kunci: Pu Sindok; analisis fungsional; kebijakan

PENDAHULUAN

Terjadinya perpindahan ibu kota pada kerajaan kerap kali dialami kerajaan besar, hal tersebut dilakukan guna menghindari adanya serangan musuh ataupun bertujuan untuk mendapatkan daerah kekuasaan yang lebih luas (Hardjowardojo, 1961). Salah satu kerajaan yang pernah memindahkan ibu kota kerajaannya ialah kerajaan Mataram Kuno, yakni yang semula memiliki ibu kota kerajaan di daerah Jawa bagian tengah menuju Jawa bagian timur (Widiah dan Kasdi, 2018). Pindahan pusat pemerintahan Mataram Kuno yang berada di Jawa bagian tengah menuju wilayah Jawa sebelah timur pada abad ke-10 menandai adanya

perubahan signifikan dalam sejarah Mataram Kuno. Naik tahtanya Pu Sindok (929--948 M) menjadi penanda untuk era baru, yakni selama sekitar 300 tahun Jawa dipimpin oleh dinasti yang baru, yaitu Wangsa Isana, nama tersebut berasal dari gelar resmi Sindok, yakni Pu Sindok Sri Isanatunggadewawijaya (Widiah dan Kasdi, 2018).

Pada saat pemerintahan Kerajaan Mataram Kuno masih berada di Jawa bagian tengah, Kerajaan Mataram Kuno sempat dipimpin oleh dua dinasti atau wangsa, yakni wangsa Sanjaya dan wangsa Syailendra. Wangsa Sanjaya memerintah Kerajaan Mataram Kuno pada tahun 732 M. Prasasti Canggal (732 M) memberi keterangan bahwa Sanjaya merupakan penerus dari Raja Sanna yang berasal dari Kerajaan Kalingga. Menurut Rahardjo (2011), Sanjaya memerintah selama 14 tahun, yakni antara 732 M hingga 746 M. Kemudian Sanjaya digantikan oleh anaknya yang berasal dari Dewi Sudiwara, yakni Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran selanjutnya berpindah agama dari penganut Siwa menjadi penganut Buddha (Praptanto, 2010). Bukti bahwa Rakai Panangkaran melakukan konversi agama menjadi seorang penganut Buddha dapat dilihat pada prasasti yang dikeluarkannya, seperti pada prasasti Kalasan 779 M. Sejak peristiwa tersebut Kerajaan Mataram Kuno diperintah oleh dinasti baru, yakni wangsa Syailendra. Hingga pada akhirnya putri mahkota wangsa Syailendra dinikahi oleh Rakai Pikatan, seorang yang mewarisi keturunan Sanjaya. Rakai Pikatan selanjutnya mendapatkan takhta dari mertuanya, hal tersebut membuat wangsa Sanjaya kembali ke tampuk kekuasaan.

Terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kerajaan Mataram Kuno silih berganti dikuasai oleh Wangsa Sanjaya dan Wangsa Syailendra. Salah satunya adalah pendapat dari Slamet Muljana berdasarkan beberapa prasasti, seperti Prasasti Kayumwungan (824 M), Kelurak (782 M), dan Nalanda (860 M) (Widiah dan Kasdi, 2018). Ketiga prasasti tersebut memuat informasi bahwa Rakai Panangkaran (746--784 M), Rakai Panunggalan (784--803 M), Rakai Warak (803--827 M), serta Rakai Garung (828--847 M) merupakan bagian dari wangsa Syailendra. Selain itu, raja Mataram Kuno lainnya berasal dari Wangsa Sanjaya. Seperti Dyah Balitung (898--910 M) yang kemudian dilanjutkan oleh Pu Daksa (913--915 M) yang memperkenalkan dirinya sebagai anggota Wangsa Sanjaya. Pu Daksa (913--915 M) digantikan oleh Dyah Tulodhong (919--928 M) yang merupakan menantunya. Masa pemerintahan Dyah Tulodhong (919--928 M) kemudian berakhir karena adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Dyah Wawa. Kekuasaan Dyah Wawa (929--929 M) tidak dapat berlangsung lama karena mendapatkan serangan dari kerajaan Melayu serta adanya peristiwa besar yang disebut *pralaya* (Hardiati, 2010).

Pralaya sendiri merupakan suatu konsep kiamat yang berkembang, terutama di wilayah Nusantara. *Pralaya* adalah sebuah konsep yang berasal dari suatu kepercayaan akan hancurnya dunia secara masif pada zaman *Kaliyuga*. Konsep *pralaya* terkait erat dengan kepercayaan dalam agama Hindu atas sebuah siklus dalam sejarah yang terus berjalan (Wibowo, 2015). *Pralaya* dianggap sebagai suatu fase penutup dari sebuah siklus sekaligus fase awal dari adanya siklus baru (kembali ke zaman *Kretayuga*) (Moniz, 2015). Peristiwa tersebut merupakan penggambaran dunia yang sudah mengalami

ketidakseimbangan. Adanya ketidakseimbangan tersebut mewujudkan menjadi bencana alam ataupun bencana sosial (Schrieke, 2016).

Terjadinya *pralaya* tampaknya menjadi poin penting pada sejarah kehidupan dalam masyarakat Jawa. Schrieke (2016) menyatakan, orang Jawa berkeyakinan bahwa setiap dinasti ataupun kerajaan yang berada di Jawa suatu saat pasti akan menghadapi adanya *pralaya* serta kemudian akan memunculkan dinasti baru yang akan membawa pada kebahagiaan untuk umat manusia. Keberadaan peristiwa *pralaya* tersebut setidaknya akan membawa kepada suatu isu tentang raja yang berkuasa di masa pasca-*pralaya* pada zaman Jawa Kuno. Dasar dari adanya isu tersebut berasal dari kitab *Agastyaparwa* yang menyatakan bahwa ketika keempat tahapan dalam kehidupan beserta keempat kasta mampu berjalan dengan harmonis, dunia dan seluruh umat manusia akan mengalami kebahagiaan. Adanya keadaan yang demikian akan membuat raja beserta keluarga dan seluruh keturunannya terbebas dari penderitaan (Alnoza, 2021).

Adanya *pralaya* yang menimpa Kerajaan Mataram Kuno tersebut juga membuat sebagian pejabat tinggi beserta anggota kerajaan dan juga rakyat mengungsi ke arah timur Jawa. Daerah tersebut kemudian disebut dunia baru, tempat pemujaan baru, pusat pemerintahan baru, serta diperintah oleh adanya wangsa atau dinasti baru pula, yakni wangsa Isana (Widiah dan Kasdi, 2018). Hal ini sesuai dengan pernyataan Schrieke sebelumnya bahwa setelah sebuah dinasti atau kerajaan mengalami *pralaya* (kerajaan Mataram Kuno dalam hal ini), akan terjadi perubahan yang memunculkan era baru bagi kerajaan tersebut bersama dengan munculnya dinasti penguasa baru yang membawa harapan akan kebahagiaan setelah adanya *pralaya*.

Dinasti baru yang menggantikan Wangsa Syailendra dan Sanjaya di Jawa bagian tengah adalah Wangsa Isana, dengan pusat pemerintahan di Jawa bagian timur. Istilah Wangsa Isana sendiri dapat ditemukan pada prasasti Pucangan yang diterbitkan oleh Airlangga pada 1041 M dalam bagian yang berbahasa Sansekerta (Hardiati, 2010). Bagian berbahasa Sansekerta tersebut memuat silsilah keluarga Airlangga, dimulai dari Pu Sindok (929--948 M) atau Sri Isanattungga. Pu Sindok kemudian berputri Sri Isanattungawijaya, yang dinikahi oleh Sri Lokapala dan menurunkan Sri Makutawangawardhana, yang pada bait ke-9 dengan sengaja disebut sebagai keturunan dari wangsa Isana (Hardiati, 2010). Sebagaimana dapat dilihat pada silsilah tersebut pendiri dari wangsa Isana adalah Pu Sindok. Sebelum menjadi raja Mataram Kuno, Pu Sindok pernah menjabat sebagai *rakryan mapatih i halu* pada masa pemerintahan Rakai Layang Dyah Tulodhong (919--928 M) dan sebagai *rakryan mapatih i hino* pada masa Rakai Sumba Dyah Wawa (928--929 M) (Widiah dan Kasdi, 2018). Prasasti Pucangan (1041 M) juga menyebutkan adanya *pralaya* yang terjadi setelah meninggalnya Raja Dharmawangsa Teguh yang merupakan paman sekaligus mertua Airlangga (Alnoza, 2022). Peristiwa *pralaya* (hancurnya dunia di akhir masa *kaliyuga*) juga disebut menjadi alasan perpindahan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Kuno dari yang sebelumnya berada di Jawa bagian tengah berpindah ke Jawa bagian timur (Hardiati, 2010). Akan tetapi, terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa terdapat tiga kemungkinan alasan pemindahan tersebut, yaitu akibat adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi, menghindari serangan dari Sriwijaya, dan karena di Jawa bagian

timur terdapat lokasi strategis untuk melakukan perdagangan, terutama karena terdapatnya aliran Sungai Brantas (Andreastuti, Newhall, dan Dwiyanto, 2006).

Setelah pemindahan pusat kekuasaan tersebut, Kerajaan Mataram Kuno dipimpin oleh Pu Sindok. Berdasarkan artikel dari Alnoza (2021), peninggalan berupa prasasti yang berasal dari masa kekuasaan Pu Sindok cukup melimpah, yakni sebanyak 23 prasasti berangka tahun berhasil ditemukan di Jawa bagian Timur. Dengan adanya 23 prasasti tersebut, rekonstruksi sejarah pada masa pemerintahan Pu Sindok dapat dilakukan dengan baik, hal tersebut memungkinkan analisis mengenai kebijakan apa saja yang sudah dilakukannya selama memerintah berdasarkan prasasti yang ada. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian secara kritis mengenai fungsi dari posisi Pu Sindok sebagai suatu unsur dari struktur kekuasaan kerajaan di Pulau Jawa abad ke-10 M.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis fungsional hasil pemikiran Robert King Merton. Pendekatan ini merupakan hasil pengembangan paradigma fungsionalisme, analisis fungsional Merton ini juga termasuk teori fungsionalisme yang ada pada masa modern. Secara empiris, pendekatan fungsional Merton dapat digunakan dalam mendapatkan kejelasan dari adanya *keteraturan*. Pendekatan tersebut memungkinkan untuk menilik sejauh mana proses pemenuhan kebutuhan dari setiap unsur yang terdapat pada sebuah struktur (Merton, 1968).

Keuntungan dari digunakannya pendekatan analisis fungsional Merton adalah pada terdapatnya sebuah kemungkinan melakukan identifikasi atas suatu bagian yang berasal dari struktur, apakah bagian tersebut memiliki sifat fungsional yang terdiri atas fungsi manifes dan juga fungsi laten, maupun *disfungsional* yang berarti tidak memiliki fungsi sama sekali. Definisi dari fungsi manifes yang disebut juga dengan *intended function* dapat diartikan sebagai fungsi dari sebuah unsur pada suatu sistem pemerintahan tempat fungsi tersebut dapat berlaku seperti seharusnya. Fungsi laten atau dapat disebut dengan *unintended function* yang berarti fungsi dari sebuah unsur pada suatu sistem pemerintahan, fungsi tersebut tidak berlaku sebagaimana mestinya atau berada di luar adanya rencana yang ditetapkan. *Disfungsional* dalam hal ini memiliki arti terdapatnya suatu unsur tertentu, unsur tersebut tidak dapat berfungsi sama sekali pada sebuah struktur. Secara praktis analisis fungsionalisme ini tentu dapat digunakan dalam menilai apakah sebuah struktur telah dijalankan sebagaimana fungsinya ataupun tidak sehingga dari sini dapat ditarik simpulan bahwa sebuah struktur tersebut sudah mampu memunculkan adanya keseimbangan sistem atau justru sebaliknya (Merton, 1968; Turner dan Maryanski, 2010). Digunakannya analisis fungsionalisme Merton dalam proses penelitian ini adalah karena pendekatan tersebut dapat menyediakan suatu pandangan tentang berfungsi atau tidaknya kebijakan Pu Sindok dalam struktur kerajaannya.

Berdasarkan adanya pembahasan mengenai pendekatan analisis fungsional dari Merton, penulis memiliki hipotesis bahwa seharusnya Pu Sindok telah mampu dalam memenuhi fungsi sebagai seorang raja dalam struktur kerajaannya. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan sebuah upaya dari penulis dalam membuktikan adanya hipotesis tersebut. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Pu Sindok dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang raja berdasarkan pendekatan analisis

fungsionalisme Merton? Rumusan masalah seperti itu kemudian dijawab supaya dapat memenuhi tujuan penelitian ini, yakni mencari informasi tentang adanya fungsi manifes, fungsi laten, serta *disfungsional* pada masa kekuasaan Pu Sindok dalam struktur kerajaannya berdasarkan kebijakan yang dikeluarkannya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang terdiri atas tiga tahap, yakni pengumpulan data, analisis, dan interpretasi (Somantri, 2005). Sementara itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pu Sindok. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, yakni dengan melakukan tinjauan secara komprehensif terhadap penelitian terdahulu mengenai sejarah masa Hindu-Buddha, sejarah Kerajaan Mataram Kuno, kajian tentang prasasti yang dikeluarkan pada masa Pu Sindok, dan kajian mengenai teori fungsionalisme. Hal tersebut dilaksanakan dengan melakukan telaah pada buku-buku, jurnal ilmiah, serta data terkait lainnya yang tersedia, baik secara daring maupun luring. Tahap analisis yang dilakukan terhadap data yang didapat meliputi penetapan angka tahun, keterangan letak ditemukan dan keberadaan terkini dari prasasti, serta ikhtisar isi prasasti untuk mengetahui kebijakan yang dikeluarkan. Hasil analisis tersebut selanjutnya diinterpretasi menggunakan teori fungsionalisme Merton.

Parameter yang digunakan penulis untuk mengukur pemenuhan kebutuhan unsur raja (Pu Sindok) dalam struktur kerajaan (Mataram Kuno) dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pedoman raja ideal yang terdapat dalam khazanah kebudayaan Jawa, yakni uraian tentang *astabrata*. Kemudian, data hasil analisis prasasti dibandingkan dengan kriteria raja ideal dalam *astabrata* untuk mengetahui kebijakan raja (Pu Sindok), termasuk dalam fungsi manifes, fungsi laten, atau disfungsional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebijakan Pemerintahan Pu Sindok

Pu Sindok berkuasa dari 929 M hingga 948 M. Selain kebijakan dalam memindahkan ibu kota kerajaan, Pu Sindok juga mengeluarkan banyak prasasti. Pada saat dilakukannya penelitian ini, sebanyak 23 prasasti berangka tahun yang berasal dari masa Pu Sindok berhasil dihimpun untuk dijadikan data. Prasasti tersebut tersebar di sekitar aliran sungai Brantas dan juga sekitar gunung Penanggungan. Prasasti pada masa Pu Sindok kebanyakan membahas penetapan *sima* atas sebuah daerah. *Sima* dapat diartikan sebagai sebuah daerah otonom yang terbebas dari kewajiban dalam membayar pajak (Haryono, 1999). Tabel 1 berikut adalah daftar prasasti yang dijadikan data penelitian untuk mengidentifikasi kebijakan yang dijalankan oleh Pu Sindok.

Tabel 1. Prasasti yang Memuat Kebijakan Pu Sindok (929--948 M)

No.	Nama Prasasti	Angka Tahun	Deskripsi
1	Prasasti Gulung-Gulung	851 S (929 M) (Damais, 1955; Cahyani dan Budiarto, 2020)	Prasasti ditemukan di Singosari dan Malang, kini disimpan di Museum Nasional Jakarta (Budiati, 1985); ditulis pada sebuah batu, menggunakan aksara dan bahasa Jawa Kuno (Damais, 1955; Cahyani dan Budiarto, 2020). Prasasti berisi permohonan Mpu Manduraloka kepada Pu Sindok agar menetapkan wilayah hutan yang terletak di Bantaran sebagai wilayah <i>sima</i> untuk digunakan sebagai sebuah tempat dilakukannya persembahan untuk <i>Sang Hyang i Pangawan</i> (Budiati, 1985).
2	Prasasti Waharu II	851 S (929 M) (Damais, 1955)	Prasasti ditemukan di daerah Jenggolo, Sidoarjo, ditulis pada lempengan tembaga, berjumlah 8 buah dan merupakan prasasti <i>timulad</i> (Budiati, 1985). Keterangan dalam Damais (1955) menyatakan bahwa prasasti berbahasa Jawa Kuno ini telah hilang. Prasasti ini dikeluarkan oleh Pu Sindok dan berisi tentang peresmian status <i>sima</i> pada daerah tersebut karena hak <i>sima</i> telah lama menjadi milik penduduknya (Budiati, 1985).
3	Prasasti Turyyan	851 S (929 M) (Damais, 1955; Jati, Suprpta, dan Wedhanto, 2014)	Prasasti ini ditemukan di Desa Tanggung, Turen, Malang, dan kini masih tetap di sana (Budiati, 1985; Jati, Suprpta, dan Wedhanto, 2014). Prasasti ini ditulis pada batu, berbahasa Jawa Kuno dan aksara Kawi (Damais, 1955). Disebutkan dalam prasasti bahwa terdapat permohonan dari Dang Atu pu Sahitya untuk memperoleh tanah yang berada di Turyyan untuk pembuatan bangunan suci. Permohonan dikabulkan dan raja juga memberi perintah kerja bakti bagi penduduk desa untuk membangun bendungan (Hardiati, 2010).
4	Prasasti Sarangan	851 S (929 M) (Damais, 1955)	Prasasti ini sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta setelah sebelumnya berada di Mojokerto, ditulis pada sebuah batu, menggunakan bahasa dan aksara Jawa Kuno, diterbitkan oleh Pu Sindok sebagaimana disebutkan dalam prasasti, berisi penetapan desa Sarangan menjadi wilayah <i>sima</i> (Damais, 1955; Budiati 1985).
5	Prasasti Linggasuntan	851 S (929 M) (Damais, 1955; Maziyah, 2011)	Prasasti berupa batu ini ditemukan di Lawajati, Malang, sekarang tersimpan di Museum Nasional Jakarta (Budiati, 1985). Prasasti ini ditulis menggunakan aksara Kawi, berbahasa Jawa Kuno dan dikeluarkan oleh Pu Sindok (Cahyani dan Budiarto, 2020). Prasasti ini berisi penetapan Desa Linggasutan yang berada dalam wilayah Rakryan Hujung menjadi suatu daerah <i>sima</i> untuk pembuatan sebuah bangunan suci yang ditunjukkan untuk <i>Bhatara i Walandit</i> (Hardiati, 2010).

6	Prasasti Cunggrang I	851 S (929 M) (Damais, 1955)	Prasasti ini terletak <i>insitu</i> di Desa Suci, Bangil, Pasuruan, dituliskan di batu dengan menggunakan aksara dan bahasa Jawa Kuno (Damais, 1955; Budiati, 1985). Prasasti ini menyebutkan bahwa Pu Sindok menetapkan Desa Cunggrang sebagai <i>sima</i> yang dipergunakan bagi adanya bangunan suci untuk menghormati mertua Pu Sindok, yakni Rakryan Bawang yang ada di <i>pawitra</i> (Widiah dan Kasdi, 2018; Hardiati, 2010).
7	Prasasti Cunggrang II	851 S (929 M) (Damais, 1955)	Prasasti ini dituliskan dalam 2 lempeng tembaga dengan nomor 1 dan 2, total ditemukan sebanyak 5 lempeng di Gunung Kawi, Malang, lempeng nomor 5, 6, dan 7 kosong, sedangkan lempeng dengan nomor 3 dan 4 tidak ditemukan (Budiati, 1985). Jika dilihat dari gaya aksaranya, diperkirakan bahwa prasasti ini adalah salinan yang berasal dari abad ke-13 dengan tanggal dan angka tahun yang sama seperti Prasasti Cunggrang I (Budiati, 1985).
8	Prasasti Poh Rinting	851 S (929 M) (Damais, 1955)	Prasasti ini ditemukan di Desa Glagahan, Jombang dan kini tersimpan di Museum Purbakala Mojokerto (Budiati, 1985); ditulis pada batu dengan menggunakan aksara Kawi dan berbahasa Jawa Kuno (Damais, 1955). Tidak disebutkan nama Pu Sindok di sini, tetapi prasasti ini menyebut permohonan Dang Acaryya kepada Sri Maharaja untuk menetapkan <i>sima</i> karena di daerah Poh Rinting tersebut terdapat bangunan suci berupa <i>kebikuan</i> (Budiati, 1985). Berdasarkan tahun terbit dan lokasi penemuan prasasti, diperkirakan Sri Maharaja yang disebut adalah Pu Sindok.
9	Prasasti Jru-jru	852 S (930 M) (Damais, 1955; Lutfillah dan Sukoharsono, 2013)	Prasasti ini ditulis pada batu, ditemukan di Singosari, Malang, dan saat ini disimpan di Museum Nasional Jakarta (Budiati, 1985). Prasasti ini menggunakan bahasa dan aksara Jawa Kuno (Damais, 1955; Cahyani dan Budiarto, 2020). Prasasti menyebut bahwa Pu Sindok menetapkan Desa Jru-jru atas permohonan Rakryan Hujung menjadi tanah <i>sima</i> untuk sebuah bangunan suci yang ditujukan untuk pemujaan kepada <i>Sanghyang Sala i Himad</i> (Budiati, 1985; Hardiati, 2010).
10	Prasasti Waharu IV	853 S (931 M) (Damais, 1955; Mahmud, 2014)	Prasasti ini dituliskan pada lempeng tembaga, ditemukan di daerah Gresik, Jawa Timur, dan saat ini disimpan di Museum Nasional Jakarta (Budiati, 1985). Prasasti ini menggunakan bahasa dan aksara Jawa Kuno, diterbitkan oleh Pu Sindok (Museum Nasional, 1985; Mahmud, 2014). Berisikan penetapan daerah desa Waharu menjadi <i>sima</i> karena kesetiaan rakyat kepada Pu Sindok (Budiati, 1985).
11	Prasasti Geweg	855 S (933 M) (Damais, 1955)	Prasasti ini terletak <i>insitu</i> di Tegaran, Jombang, tertulis di sebuah batu, menggunakan bahasa Jawa Kuno (Damais, 1955; Budiati, 1985). Prasasti ini

- menyebutkan bahwa Pu Sindok dan permaisurinya, Pu Kbi, menetapkan Desa Geweg menjadi wilayah *sima* (Budiati, 1985; Hardiati, 2010).
- 12 Prasasti Sumbut 855 S (933 M) (Damais, 1955) Kemungkinan prasasti ini ditemukan di Surabaya, ditulis menggunakan bahasa dan aksara Jawa Kuno pada lempeng tembaga, bagian lempeng yang berisi awal prasasti, saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan lempeng lanjutannya sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta; prasasti ini dikeluarkan pada masa Pu Sindok yang kemudian disalin pada masa Majapahit (Budiati, 1985; Museum Nasional, 1985). Prasasti ini memuat informasi tentang peresmian *sima* Desa Sumbut karena jasa rakyat Sumbut dalam membantu raja untuk menghalau musuh (Budiati, 1985; Hardiati, 2010).
- 13 Prasasti Paradah I 856 S (934 M) (Damais, 1955) Prasasti ini ditemukan di Desa Siman, Kediri, dan sampai sekarang masih insitu, prasasti ini ditulis pada sebuah batu dengan menggunakan bahasa Jawa Kuno (Damais, 1955; Budiati, 1985); berisi mengenai penetapan *sima* oleh Pu Sindok karena permohonan warga *wahuta* di Paradah untuk bangunan suci berupa *kabikuan* (Budiati, 1985; Hardiati, 2010).
- 14 Prasasti Hering 856 S (934 M) (Damais, 1955; Pradita dan Wardhana, 2021) Prasasti ini ditemukan di Desa Kujon Manis, Nganjuk, dan sekarang berada di Museum Nasional Jakarta. Prasasti ini ditulis pada sebuah batu dan berbahasa Jawa Kuno (Damais, 1955; Budiati, 1985). Prasasti ini menyebutkan bahwa Pu Sindok menetapkan Desa Hering sebagai *sima* melalui Rakai Kanuruhan Pu Ta, *sima* tersebut ditujukan untuk pemeliharaan Wihara yang dibeli oleh Pu Danghil dan istrinya, Dyah Pandel (Hardiati, 2010; Budiati, 1985).
- 15 Prasasti Kanuruhan 856 S (935 M) (Damais, 1955) Prasasti ini tertulis di bagian belakang arca Ganesha, berbahasa Jawa Kuno dan saat ini berada di Museum Mpu Purwa, Malang (Damais, 1955; Budiati, 1985; Tjahjowulan dan Gardjito, 2021). Prasasti ini dikeluarkan oleh Dyah Mungpah, seseorang yang menjabat pada masa pemerintahan Pu Sindok, di dalamnya memuat informasi mengenai peresmian adanya sebidang tanah yang termasuk dalam daerah Kanuruhan menjadi *sima* dan diperuntukkan bagi kebun bunga (Hardiati, 2010).
- 16 Prasasti Wulig 856 S (935 M) (Damais, 1955; Fauzi, 2015) Prasasti berbahasa Jawa Kuno ini ditemukan di Desa Bakalan, Mojokerto, dan saat ini berada di Museum Purbakala Mojokerto (Damais, 1955; Budiati, 1985); berisi tentang perintah dari istri Pu Sindok, yakni Rakryan Binihaji Rakryan Mangibil, terhadap penduduk Desa Wulig untuk membangun

			sebuah bendungan (Fauzi, 2015; Hardiati, 2010).
17	Prasasti Anjukladang	859 S (937 M) (Damais, 1955; Sari dan Wibowo, 2017)	Prasasti ini ditemukan di Candi Lor, Nganjuk, sekarang terdapat di Museum Nasional Jakarta. Prasasti batu berbahasa Jawa Kuno ini dikeluarkan oleh Pu Sindok berisi tentang penetapan sawah <i>kakatikan</i> sebagai <i>sima</i> untuk bangunan suci yang digunakan untuk menyembah <i>Sang hyang Prasada Kabaktyan i Sri Jayamerta</i> . Selain itu, juga terdapat informasi mengenai kemenangan Pu Sindok atas musuh dari Melayu (Damais, 1955; Budiati, 1985; Hardiati, 2010).
18	Prasasti Sobhamerta	861 S (939 M) (Griffiths, 2020)	Prasasti ini tertulis di 7 lempeng tembaga, ditemukan di Desa Betro, Sidoarjo; lempeng pertama hingga ketiga tersimpan di Museum Leiden dan sisanya di Museum London; ditulis menggunakan bahasa dan aksara Jawa Kuno dan merupakan prasasti <i>tinulad</i> dari abad ke-14 (Damais, 1955; Budiati, 1985). Prasasti ini menyebutkan bahwa Pu Sindok menetapkan status <i>sima</i> atas sebidang tanah Desa Sobhamerta untuk pemeliharaan Wihara (Budiati, 1985; Susanti, 2010).
19	Prasasti Alasantan	861 S (939 M) (Ginanjar, 2018)	Prasasti ini ditemukan di Desa Bejjong, Mojokerto dan kini disimpan di Museum Purbakala Mojokerto. Prasasti ini ditulis menggunakan bahasa Jawa Kuno di sebuah lempeng tembaga (Budiati, 1985). Prasasti ini menyebutkan bahwa Pu Sindok menetapkan status <i>sima</i> atas tanah di Alasantan milik Rakryan Kabayan (Budiati, 1985).
20	Prasasti Kamban	863 S (941 M) (Damais, 1955)	Prasasti ini ditemukan di Desa Pelem, Mojokerto, dan sekarang berada di Museum Nasional Jakarta. Prasasti ini ditulis menggunakan bahasa dan aksara Jawa Kuno di sebuah lempeng tembaga yang dibuat pada zaman Majapahit (Budiati, 1985; Museum Nasional 1985). Dalam prasasti ini disebutkan bahwa Pu Sindok menetapkan Desa Kamban sebagai wilayah <i>sima</i> (Budiati, 1985).
21	Prasasti Paradah II	865 S (943 M) (Damais, 1955; Widiatmoko dkk., 2023)	Prasasti ini ditemukan di Desa Siman, Kediri, dan sekarang terletak <i>insitu</i> di samping prasasti Paradah I; tertulis pada sebuah batu dengan menggunakan bahasa Jawa Kuno (Damais, 1955; Budiati, 1985). Prasasti ini diterbitkan oleh Pu Sindok dan berisi tentang penetapan <i>sima</i> atas tanah sawah di sebelah utara sungai Desa Paradah yang dibeli oleh sang Sluk (Budiati, 1985).
22	Prasasti Muncang	866 S (944 M) (Damais, 1955; Istari, 2015)	Prasasti ini ditemukan di Blandit, Wonorejo, Singosari, Malang, saat ini berada di Museum Mpu Purwa Malang. Prasasti batu ini menggunakan bahasa dan aksara Jawa Kuno (Istari, 2015; Tjahjawulan dan Gardjito, 2021). Isinya menyebutkan bahwa Pu Sindok menetapkan <i>sima</i> atas sebidang tanah yang

berada di selatan pasar Muncang, *sima* tersebut ditetapkan untuk sebuah bangunan suci *siddhayoga* (Budiati, 1985; Hardiati, 2010).

23 Prasasti Wurandungan I 869 S (948 M) (Damais, 1955)

Prasasti ini ditemukan di Malang, Jawa Timur, tetapi kini sudah hilang. Prasasti ini merupakan prasasti salinan dan ditulis pada 7 lempeng tembaga, menggunakan bahasa Jawa Kuno (Damais, 1955; Budiati, 1985). Prasasti ini menyebutkan bahwa Pu Sindok menetapkan seluruh wilayah Kanuruhan sebagai *sima* untuk bangunan suci yang berfungsi sebagai persembahan kepada *Sang Hyang Dharmma Kahyangan i Wurandungan* (Budiati, 1985).

Masa pemerintahan Pu Sindok sebagai penguasa Jawa memiliki keunikan apabila dibandingkan dengan masa pemerintahan raja-raja setelahnya, seperti Airlangga ataupun Jayabhaya. Kedua raja tersebut sering mengeluarkan kebijakan berupa *sima makudur*, yakni penetapan *sima* oleh raja kepada seseorang atau penduduk suatu daerah yang mempunyai jasa besar bagi seorang raja (Darmosoetopo, 1998). Masa pemerintahan Pu Sindok dapat dikatakan berfokus pada pembangunan infrastruktur secara masif apabila dibandingkan dengan kedua raja tersebut di atas (Alnoza, 2021). Pembangunan di bidang keagamaan dapat dilihat dari terdapatnya penetapan *sima punpunan*. Kebijakan tersebut berlaku untuk Agama Buddha ataupun Agama Saiwa. *Sima punpunan* adalah suatu daerah *sima* yang digunakan sebagai tempat pembangunan suatu bangunan yang bersifat suci keagamaan (Darmosoetopo, 1998). Kebijakan tersebut tampaknya menjadi ciri khas tersendiri pada masa Pu Sindok berkuasa. Pernyataan yang demikian berhasil didapatkan karena dari seluruh jumlah prasasti yang didata, terdapat 13 prasasti yang memuat penetapan daerah sebagai *sima punpunan* (Alnoza, 2021). Sementara itu, kebijakan yang bersifat sosial dapat diidentifikasi dari terdapatnya sebuah prasasti yang memuat anugerah dari Pu Sindok berupa penetapan *sima makudur*. Selain itu, kebijakan bersifat sosial lainnya yang dapat diidentifikasi berdasarkan data prasasti yang dikeluarkan oleh Pu Sindok adalah adanya sebuah kebijakan berupa penetapan suatu *sima* yang digunakan sebagai sarana pemeliharaan sebuah fasilitas. Adanya kebijakan seperti itu dapat dilihat dalam prasasti Turyyan (929 M) serta prasasti Kanuruhan (935 M) yang memuat informasi mengenai penetapan daerah *sima* untuk pemeliharaan bendungan dan kebun bunga. Ciri yang patut diperhatikan mengenai kebijakan masa Pu Sindok, yakni sering kali dibuat prasasti yang berisi kebijakan, terutama di sekitar tahun 929 M. Hal ini menandakan bahwa Pu Sindok sengaja menjadikan tahun pertama kekuasaannya untuk program pembangunan.

Hal lain yang juga perlu dicatat adalah kebijakan penetapan *sima* atas sebuah wilayah berdasarkan permintaan dari rakyat atau pejabat suatu wilayah itu sendiri. Penetapan daerah sebagai *sima* yang berdasarkan perintah Pu Sindok sendiri hanya terdapat pada prasasti Lingasuntan (929 M) baris ke 2--6 mengenai status *sima* Desa Lingasuntan sebagai berikut;

2. "...irikā diwaśa ni ājña śrī ma
3. hārāja rake hino mpu sindok śrī tśānawikrama dharmmotunggadewa, umingsor i samgat mo
4. mahhumah kāliḥ maḍaṇḍēr, pu padma, anggēhān, pu kuṇḍala, kumonakan ikang wanua i lingga suntan, wa
5. tak hujung gaway mā 2 [rwa] kaṭik ing guhan tapak mas 3 [tlu] ing satahun satahun simān susukan arpanākna i
6. bhaṭāra i walaṇḍit..." (Brandes, 1913).

Prasasti Linggasuntan (929 M) mengatakan bahwa raja memberikan perintah supaya Desa Linggasuntan di bawah wilayah Rakryan Hujung ditetapkan sebagai *sima* untuk persembahan kepada *bhatara* di Walandit (Hardiati, 2010). Perintah tersebut kemudian dituangkan juga pada penetapan sawah *kakatikan* pada prasasti Anjukladang (937 M) baris ke 2-8 sebagai berikut:

2. "...irika di (wa)
3. Sanya ajnacri mhraja pu sindok cri icanawikrama dharmmotunggadewa tinadah rakryan mapighai kalih (ra)
4. (ke hino pu sahasra, rake) wka pu balicwara umingso i rakai kanuruhan pu da kumonakan ikanang lmah sawah kakatikan
5. marpanakna i bhatara i sang hyang prasada kabhaktyan i dharmma samgat pu anjuk-ladang
6. cri maharaja i cri jayamrta sima punpunana bhatara
7. pratidina mangkana cri maharajarikanang sawah kakatikan
8. n i bhatara i sang hyang i sang hyang prasada kabhaktyan i cri jayamrta..." (Sari dan Wibowo, 2017).

Dikatakan dalam prasasti Anjukladang (937 M) tersebut bahwa sang raja memberikan perintah supaya tanah berupa sawah *kakatikan* yang terletak di Anjukladang ditetapkan sebagai *sima* untuk persembahan kepada *sang hyang prasada kabaktyan Sri Jayamerta*. Sayangnya sekali pemberian *sima* tersebut tidak dapat dilacak karena usangnya bagian atas prasasti (Hardiati, 2010).

Pembangunan masif yang dijalankan pada masa pemerintahan Pu Sindok dapat dikaitkan dengan adanya konsep yang diyakini masyarakat waktu itu, yakni konsep kehidupan pasca terjadinya *pralaya*. Informasi tentang adanya keyakinan tersebut terdapat secara tersirat dalam prasasti Pucangan (1041 M), sebagian isinya menjelaskan bahwa apabila ada penjelmaan Wisnu, dia tidak akan binasa oleh adanya *mahapralaya* (Susanti, 2010). Prasasti Pucangan (1041 M) memberi isyarat bahwa masyarakat pada zaman itu meyakini bahwa seorang raja yang mampu bertahan atau selamat dari peristiwa *pralaya* merupakan manifestasi dari Wisnu itu sendiri. Adanya keyakinan semacam itu dapat menjadi benang merah dengan adanya mitologi *Wisnu-Anantasyin*, yaitu mitologi yang menjelaskan peran Wisnu dalam proses penciptaan dunia. Wisnu sendiri diyakini oleh penganut Waisnawa sebagai makhluk hidup yang tersisa setelah adanya *pralaya*. Ketika itu Wisnu dicitrakan mengapung dengan berbaring di atas naga *ananta*. Wisnu berbaring di samudra tidak terbatas dengan langit yang gelap dan kosong. Ribuan tahun Wisnu tertidur sambil mengapung hingga bunga teratai tumbuh dari pusarnya kemudian

memunculkan Brahma. Selanjutnya Brahma memulai kembali penciptaan yang sebelumnya sudah hancur disebabkan oleh adanya *pralaya* (Alnoza, 2021).

Adanya mitologi ini pada dasarnya dapat memberikan penegasan bahwa Wisnu adalah dewa di atas semua dewa yang terlibat pada masa penciptaan dan juga masa peleburan. Pada dasarnya, baik Siwa maupun Brahma juga dipercaya sebagai suatu manifestasi dari Wisnu itu sendiri (Liebert, 1976; Munandar, 2014). Keterangan mengenai adanya mitologi ini terkait erat dengan ekspektasi atau harapan rakyat kepada seorang raja yang sedang berkuasa. Rakyat memandang sang raja sebagai perwujudan dari *Wisnu* mereka pasti mengharapkan adanya suatu kebahagiaan setelah adanya suatu penderitaan di kala *pralaya*. Dengan demikian, seorang raja harus mempunyai pengetahuan atas adanya keinginan rakyat sehingga dengan itu sang raja dapat memperkuat citra diri sebagai penjelmaan Wisnu itu sendiri seperti yang diinginkan dan diharapkan. Rakyat mesti merasa bahwa mereka seolah-olah sudah memasuki zaman baru, yakni masa *kertayuga* karena sebelumnya mereka sudah berhasil melewati masa *kaliyuga*. Adanya fenomena kontrak sosial terlihat dengan jelas pada bagian ini, terutama dalam posisi raja yang sedang berkuasa untuk perlu menuruti adanya kehendak khalayak umum (pada kasus ini adalah adanya kebahagiaan setelah *pralaya*) yang berasal dari rakyatnya dalam rangka mendapatkan legitimasi sebagai perwujudan dari sang Wisnu (Alnoza, 2021).

Hasil analisis dari Alnoza (2021) menyatakan bahwa Pu Sindok yang menyadari adanya fenomena tersebut mulai berusaha untuk menggambarkan diri seperti sosok juru selamat serta sosok pemelihara layaknya Wisnu. Adanya hal tersebut menjadi masuk akal apabila Pu Sindok selanjutnya menetapkan kebijakan berupa pembangunan pada saat dia berkuasa di Mataram Kuno karena adanya *pralaya* sudah membuat bangunan ataupun fasilitas yang ada sebelumnya menjadi luluh lantak. Adanya pendapat seperti ini menjadi lebih dapat diyakini karena pada masa awal pemerintahan, Pu Sindok sering membangun berbagai fasilitas umum, khususnya berupa bangunan suci keagamaan. Kehancuran bangunan suci disebabkan adanya *pralaya* merupakan pertanda utama adanya *pralaya* itu sendiri. Oleh karena itu, pembangunan suatu bangunan suci menjadi sangat penting untuk dilakukan sebagai pertanda dimulainya era baru pasca terjadinya *pralaya* (Schrieke, 2016). Pendirian bangunan suci secara gencar oleh Pu Sindok merupakan upaya untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa dia adalah pemimpin baru yang akan membawa mereka memasuki zaman *kretayuga*. Selain dengan alasan untuk mendapat legitimasi, pendirian bangunan suci juga bertujuan untuk menggantikan bangunan suci di pusat pemerintahan sebelumnya yang hancur karena adanya *pralaya*. Pu Sindok juga mencitrakan dirinya sebagai pemelihara dengan melakukan pembangunan terhadap bangunan yang sebelumnya tidak begitu diperhatikan seperti pembangunan bendungan dan juga kebun bunga (Alnoza, 2021).

Aspek dalam Konsep Astabrata

Astabrata merupakan istilah dalam bahasa Jawa Kuno yang berasal dari dua suku kata, yaitu *asta* (delapan) dan *brata* (laku). Dengan demikian, secara bahasa *astabrata*

berarti 'delapan *lelaku*'. Konsep tersebut pada mulanya adalah penggalan kutipan dari *Kakawin Ramayana* yang berkembang pada sekitar abad ke-9 Masehi (Boechari, 2012b).

Berikut disajikan kutipan yang berasal dari *kakawin ramayana*, kemudian di bawahnya disajikan juga terjemahan dari kutipan tersebut.

51. *"Lawan sira kinonaken katwaña, apan hana bhaṭāra muñgwñ sira, wwaluñ hyañ apupul rywawak sañ prabhu, dumeh sira mahāprabhāwāsama.*
52. *Hyañ Indra Yama Sūrya Candrānila, Kuwera Barunāgni nāhan wwalu, sira ta maka añga sañ bhūpati, matañ niran iniṣṭi aṣṭabrata.*
53. *Nihan brata ni sañ hyañ indrālapen, sirāñ hudanaken tumṛptñ jagat, sirāta tuladen ta indrabrata, sudāna ya hudan ta mañlyābi rāt.*
54. *Yamabrata ḍumañḍa karmāhala, sirekana maluñ maliñ yar pejah, umilwa kita malwan olah salah, asiññ umawarāñ sarat pati.*
55. *Bhaṭāra Rawi mañhisep wwai lanā, ndatan kara śanañh śanañh de nira, samankana kitāt alap pañguhen, tatar gelisa yeka sūryabrata.*
56. *Śaśibrata humarṣukañ rat kabeh, ulah ta mṛḍu komalā yan katon, guyun ta mamanis ya tulyāmṛta, asiñ matuha pañḍitāt swāgatan.*
57. *Haniñ ta kita yat pañinte ulah, kumwruhana buddhi niñ rāt kabeh, sucāra ya panon ta tātan katon, ya dibyaguna sūkṣma bāyubrata.*
58. *Mamuktyañ upabhoga sinambinñ inak, taman panepeneñ pañan mwaññ inum, manañḍaña mabhūṣaṇā mahyasa, nahan ta dhanadabratānuñ tirun.*
59. *Bhaṭāra barunāñgegē sañjata, mahāwisa ya nāgapāśāñapus, sirāta tuladen ta pāsabrata, kitomapusanañ watek durjana.*
60. *Lanāñgeseñi śatru bahñibrata, galak ta ri musuh yekā puya, asiñ sainasēn taśirñāpasah, ya tekana sinañguh agibrata."* (Boechari, 2012a).

Terjemahan kutipan tersebut adalah sebagai berikut:

51. "Dan kamu disuruh menjadi raja (untuk di hormati), sebab ada dewa-dewa pada dirimu, delapan dewa-dewa berkumpul dalam badan sang raja, yang menjadikan kamu berkuasaan besar tiada bertara.
52. Dewa Indra, Yama, Surya, Candra, Anila (Bayu), Kuwera, Baruna, dan Agni, itulah delapan, merekalah yang menjadi badan sang raja, karena itulah ia diharapkan akan menjalankan astabrata.
53. Inilah laku hyang Indra yang hendaknya kau ambil, ia mendatangkan hujan dan menentramkan dunia; laku hyang Indra itulah hendaknya kau tiru, (yaitu) hendaknya kamu menghujankan hadiah yang banyak hingga menggenangi seluruh dunia (= merata ke segenap rakyat).
54. Laku hyang Yama ialah menghukum perbuatan jahat, ia memukul pencuri-pencuri apabila mereka mati, demikianlah hendaknya kamu ikut memukul semua perbuatan salah, Bunuhlah semua orang yang berusaha merintang (ketentraman) dunia.
55. Batara Rawi (Surya) selalu mengisap air, tiada hentinya, perlahan-lahan, demikianlah tindakannya, demikianlah hendaknya kamu dalam mengambil sesuatu "hasil", janganlah tergesa-gesa, itulah (seperti halnya) laku dewa Surya.
56. Laku dewa Bulan ialah menggembirakan seluruh dunia, (seperti bulan itulah) hendaknya tingkah lakumu kelihatan lemah lembut, hendaknya ketawamu manis seperti amerta, semua orang tua-tua dan cerdik pandai hendaklah kamu jamu dengan selayaknya.
57. Hendaklah kamu seperti dewa Angin jika mengintai perbuatan, hendaklah kamu ketahu. Pandanganmu hendaklah baik, jangan sampai kelihatan; demikianlah laku dewa Bayu: mempunyai sifat sifat luhur dan tidak tampak (oleh siapapun langkah-langkahnya).
58. Kecaplah serba kenikmatan dan keenakan, jangan membatasi diri dalam makan dan minum, berpakaianlah, pakailah barang-barang perhiasan bersoleklah, demikianlah laku dewa Dhanada yang hendaknya kamu tiru.

59. Dewa Baruna memegang senjata, Nagapasa yang sangat berbisa dan dapat mengikat, dialah hendaknya kamu tiru dalam *pasabrata* (ialah) hendaknya kamu mengikat semua penjahat.
60. Laku dewa Api ialah selalu membakar musuh, kamu ganas terhadap musuh seperti api, barang siapa kamu serang hancur lebur, itulah yang dipandang laku dewa Api” (Boechari, 2012a).

Kedelapan prinsip di atas merupakan sebuah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang raja. Penerapan delapan prinsip tersebut akan menjadikan seorang raja menjadi raja ideal menurut konsepsi orang Jawa. Adanya delapan unsur ciptaan tersebut menjadikan manusia dapat berlaku seimbang dan menjadikannya sebagai gambaran dari seorang pemimpin ideal dengan berlandaskan religiusitas. Kemampuan seorang raja untuk menerapkan delapan prinsip *astabrata* menjadi bukti bahwa raja tersebut merupakan wujud penjelmaan dewa sebagai pemerintah atau penguasa di bumi.

Astabrata sendiri juga terdapat dalam kutipan *Kakawin Ramayana*, mengisahkan Sri Rama yang telah berhasil dalam mengalahkan Raja Alengka, yakni Rahwana, kemudian Rama mengangkat Wibisana, adik Rahwana, untuk menjadi raja baru di Alengka. Wibisana yang menerima perintah dari Rama tersebut merasa ragu untuk memerintah Alengka sehingga Sri Rama menasehati Wibisana dengan delapan lelaku yang harus dilaksanakan oleh seorang raja yang ideal. Delapan lelaku dalam versi *Kakawin Ramayana* ini adalah meneladani sifat dewa yang mendiami delapan mata angin (*hastadikpalaka*), delapan sifat dewa tersebut harus terdapat dalam diri seorang raja.

Delapan dewa yang mendiami mata angin tersebut ialah Agni, Baruna, Bayu, Candra, Indra, Kuwera, Surya, dan Yama, sedangkan sifat dari delapan dewa tersebut adalah Dewa Agni bersifat membinasakan bagi musuh layaknya api; Dewa Baruna bersifat tegas dalam menegakkan hukum layaknya senjata Baruna berupa jerat Nagapasa; Dewa Bayu bersifat lembut dalam perbuatan ataupun dalam mengamati suatu perbuatan serta memiliki wawasan yang luas tanpa terlihat mencolok; Dewa Candra bersifat menggembirakan bagi seluruh dunia, tingkah laku lemah lembut, manis dalam bertutur, dan menghormati orang tua serta seluruh pendeta; Dewa Indra bersifat menenteramkan dengan menurunkan hujan sebagai hadiah yang membanjiri dunia; Dewa Kuwera bersifat mewah, elegan, dan berwibawa dengan berdandan dan bersolek untuk menjadi simbol kejayaan; Dewa Surya bersifat hati-hati dalam bertindak layaknya matahari menguapkan air dengan perlahan; sedangkan Yama bersifat memberantas semua rintangan dan keras dalam menghukum penjahat (Munandar, 2017).

Analisis Fungsional pada Pemerintahan Pu Sindok

Aspek dalam *astabrata* yang mengatakan bahwa raja haruslah dermawan dengan mampu memberi hadiah melimpah kepada rakyatnya dapat dipenuhi oleh Pu Sindok, penerapannya adalah melalui adanya kebijakan berupa penetapan *sima makudur* kepada rakyatnya. Melalui adanya kebijakan *sima makudur* tersebut berarti Pu Sindok telah memberikan hak istimewa bagi suatu daerah untuk bebas dari membayar pajak kepada negara. Kebijakan pemberian *sima makudur* dapat diklasifikasikan sebagai fungsi manifes dari Pu Sindok dengan meneladani dewa Indra dalam *astabrata*.

Fungsi manifes bagi Pu Sindok juga terpenuhi dengan berhasilnya Pu Sindok dalam menghalau musuh. Keganasan Pu Sindok terbukti dari peristiwa yang disebutkan pada prasasti Anjukladang (937 M), saat itu Pu Sindok berhasil menghukum dengan mengalahkan musuh yang berasal dari Melayu (Hardiati, 2010). Hal tersebut sesuai dengan aspek meneladani Dewa Agni, Baruna, dan Yama yang terdapat dalam *astabrata*. Kebijakan lain seperti pemenuhan permintaan *sima* dari rakyat ataupun pejabat daerah juga merupakan bukti pemenuhan aspek *astabrata* bahwa dalam kasus ini raja mempunyai wawasan yang luas akan wilayah kerajaannya sehingga dapat mengetahui permintaan rakyatnya. Wawasan luas atas wilayah kerajaan tersebut sesuai dengan aspek dalam *astabrata*, yakni meneladani dewa Bayu yang memiliki wawasan luas atas dunia.

Aspek lain dalam *astabrata* adalah meneladani Dewa Candra dengan melakukan penghormatan kepada yang lebih tua atau kepada pendeta. Aspek tersebut juga berhasil dipenuhi oleh Pu Sindok serta dibuktikan dalam prasasti Cunggurang (929 M), yakni Pu Sindok menetapkan *sima* untuk bangunan suci yang dipersembahkan untuk menghormati mertuanya, yakni Rakryan Bawang dan pada prasasti Alasantan (939 M), yaitu terdapat penetapan *sima* yang ditujukan kepada ibunda Rakryan Mapatih i Halu Dyah Sahasra (Alnoza, 2021). Selain itu, Pu Sindok juga banyak menetapkan pemberian *sima punpunan*, baik dalam bentuk pendirian bangunan suci atau pemeliharaan fasilitas keagamaan, seperti yang ditunjukkan dalam prasasti Hering (934 M) dan prasasti Sobhamerta (939 M). Berdasarkan bukti tersebut, Pu Sindok berhasil menjalankan fungsi manifesnya dalam menghormati orang tua dan para pendeta sesuai dengan aspek dalam *astabrata*, yakni dengan meneladani Dewa Candra.

Adanya kebijakan pembangunan masif dalam masa pemerintahan Pu Sindok juga merupakan suatu pemenuhan terhadap aspek *astabrata*, yakni meneladani Dewa Kuwera dengan berperan sebagai simbol kejayaan bagi kerajaannya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kemampuan Pu Sindok dalam melakukan pembangunan secara besar-besaran dan hal ini dapat menggambarkan kejayaan seorang raja, terutama apabila kerajaannya baru saja menghadapi *pralaya*. Pembangunan yang dilakukan secara besar-besaran, baik berupa pendirian bangunan suci maupun fasilitas umum, seperti bendungan ataupun kebun bunga menunjukkan bahwa sebuah kerajaan yang baru saja tertimpa musibah *pralaya* dapat dibangkitkan kembali kejayaannya. Oleh karena itu, kebijakan ini dapat diidentifikasi sebagai suatu fungsi manifes bagi Pu Sindok.

Fungsi laten pada masa pemerintahan Pu Sindok adalah terdapatnya aspek demokrasi, hal tersebut memungkinkan rakyat ataupun pejabat yang berkedudukan di bawah raja untuk mengajukan permohonan terhadap raja. Contohnya adalah dalam prasasti Gulung-gulung (929 M), Rakryan Hujung mengajukan permohonan *sima*, dalam prasasti Turryan (929 M) yang memuat permohonan *sima* dari Dang Atu pu Sahitya, kemudian pada prasasti Poh Rinting (929 M) terdapat permohonan Dang Acarya untuk mendapatkan *sima*, pada prasasti Jru-jru (930 M), Rakryan Hujung kembali memohon penetapan *sima*, dan pada prasasti Paradah I (934 M), juga memuat permohonan penganugerahan *sima* dari warga *wahuta* di Paradah (Hardiati, 2010). Adanya aspek demokrasi tersebut tidak terdapat dalam pedoman *astabrata*, bahkan aspek demokrasi pada masa pemerintahan Pu Sindok

dapat muncul justru karena adanya pemenuhan fungsi manifes bahwa raja harus memberikan hadiah layaknya Dewa Indra dalam pedoman *astabrata*.

Kebijakan yang menjadi *disfungsi* pada masa Pu Sindok karena tidak sesuai dengan aspek *astabrata* ialah bertindak secara hati-hati atau perlahan meneladani sifat Dewa Surya adalah pada saat proses pemindahan kekuasaan dari Jawa bagian tengah menuju Jawa bagian timur. Apabila kebijakan pemindahan pusat pemerintahan termasuk dalam fungsi laten, di sini akan dijelaskan bahwa proses dari pemindahan tersebut justru menjadi *disfungsi* pada pemerintahan Pu Sindok. Suatu proses pemindahan tersebut harusnya dapat berjalan dengan mulus dan tanpa adanya pemberontakan dari para raja bawahan lain, terutama raja bawahan di wilayah Mataram Kuno yang ada di bagian timur Pulau Jawa. Apabila hal tersebut yang terjadi, dapat dikatakan bahwa proses pemindahan pusat pemerintahan tersebut adalah fungsi manifes dari Pu Sindok karena berhasil meneladani sifat sang Surya, yakni bertindak secara hati-hati atau perlahan-lahan. Akan tetapi, terdapat indikasi bahwa proses pemindahan pusat pemerintahan tersebut berjalan tidak mulus yang ditandai dengan adanya peperangan melawan raja bawahan yang tidak bersedia tunduk sehingga perlu ditaklukkan dengan peperangan, hal tersebut bukanlah hal yang mustahil terjadi. Informasi yang termuat dalam prasasti Waharu IV (931 M) menyebutkan sebagai berikut:

IIa

1. "... sambandha. gati warga | haji, an nityasa suṣṭu-bhakti mamrihakên ri śri mahārāja, riṅ samara-kāyya(-kāryya?), maka cihna sañjata
2. warga haji, | sarā dhirotsahā sañukasuranya, maka rahineng
3. wñi, saha doja, tabêtabêhan, umiring bala pāduka śri ma|hārāja, añrarah umilañakên sakahananing satru kañkên andha
4. kārāwasarira, ..." (Stuart, 1875).

Kutipan di atas secara samar membayangkan adanya peristiwa peperangan yang berhasil dimenangkan oleh Pu Sindok berkat bantuan penduduk Waharu (Hardiati, 2010). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proses pemindahan pusat pemerintahan dari Jawa bagian tengah menuju Jawa bagian timur oleh Pu Sindok tidak dapat memenuhi aspek *astabrata*, yakni meneladani sifat dewa Surya dan justru menjadi *disfungsi* dalam masa pemerintahannya atas Kerajaan Mataram Kuno.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada kebijakan-kebijakan masa pemerintahan Pu Sindok, dapat disimpulkan bahwa selama masa pemerintahannya, Pu Sindok dapat melaksanakan fungsi manifes dan fungsi laten pada hampir seluruh aspek dalam *astabrata* serta bersifat *disfungsi* dalam aspek yang lain. Fungsi manifes Pu Sindok banyak terlihat dari kebijakannya pada bidang pembangunan infrastruktur keagamaan, sedangkan fungsi laten terdapat pada bidang kebijakan sosial kemasyarakatan, seperti adanya aspek demokrasi pada masa pemerintahannya. Berdasarkan hasil yang didapat tersebut, tidak berlebihan apabila dinyatakan bahwa Pu Sindok adalah seorang raja yang cenderung mengutamakan pembangunan dalam masa pemerintahannya. Hal ini tercermin

melalui banyaknya kebijakan pemberian *sima punpunan* kepada rakyatnya, baik yang dimohon maupun Pu Sindok sendiri yang menetapkannya. Hasil dari analisis fungsional ini juga menunjukkan bahwa Pu Sindok sebagai penguasa Kerajaan Mataram Kuno dapat dikatakan belum mencapai tahap sempurna atau ideal sebagai seorang raja sesuai dengan yang terdapat dalam *astabrata*. Simpulan tersebut diambil karena masih adanya sebagian aspek dalam *astabrata* yang belum dapat dipenuhi oleh Pu Sindok selama dia memerintah sebagai raja. Meskipun begitu, penelitian ini juga tidak dapat memastikan bahwa Pu Sindok bukan raja yang ideal.

Pada dasarnya hasil akhir penelitian ini bergantung pada ketersediaan data yang belum lengkap. Hal tersebut yang menyebabkan analisis mengenai kebijakan-kebijakan Pu Sindok belum dapat dijabarkan secara lengkap. Semakin bertambahnya temuan prasasti atau adanya manuskrip pendukung tentu dapat mengubah penafsiran tentang kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Pu Sindok selama masa pemerintahannya. Oleh karena itu, hasil penelitian ini masih bersifat sementara karena hanya berdasar pada data yang tersedia saat ini mengenai kebijakan pemerintahan Pu Sindok. Dengan demikian, tentu masih diperlukan adanya penelitian lebih lanjut di masa mendatang dengan sumber yang lebih memadai sehingga dapat diperoleh tafsiran yang lebih lengkap mengenai kebijakan masa pemerintahan Pu Sindok.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Subekti, S.Pd., M.A. selaku dosen yang membimbing dan telah memberikan banyak bantuan kepada penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Slamet Sujud Purnawan Jati, M. Hum. dan kepada Ibu Dra. Yuliati, M.Hum. selaku dosen penguji materi yang telah memberikan banyak masukan dan saran kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alnoza, Muhamad. 2021. "Arah Kebijakan Raja pada Masa Jawa Kuno Pasca Peristiwa Pralaya dari Sudut Pandang Teori Kontrak Sosial". *Prosiding Balai Arkeologi Jawa Barat*, Oktober, 223–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.24164/prosiding.v4i1.21>.
- Alnoza, Muhamad. 2022. "Mempertimbangkan Kembali Raja Pembaru Jawa: Analisis Fungsional pada Gaya Pemerintahan Raja Airlangga pada Abad Ke-11 M". *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya* 5 (2): 113–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.33652/handep.v5i2.262>.
- Andreastuti, Supriati Dwi, Chris Newhall, dan Joko Dwiyanto. 2006. "Menelusuri kebenaran letusan Gunung Merapi 1006". *Indonesian Journal on Geoscience* 1 (4): 201–7. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17014/ijog.vol1no4.20064>.
- Boechari. 2012a. "Aṣṭabrata". Dalam *Melacak Sejarah Kuno Indonesia lewat Prasasti*, 531–41. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

- Boechari. 2012b. "Epigraphic Evidence on Kingship in Ancient Java." Dalam *Melacak Sejarah Kuno Indonesia lewat Prasasti*, 217–25. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Brandes, Jan Laurens Andries. 1913. *Oud-Javaansche Oorkonden: Nagelaten transcripties van willen Dr. JLA Brandes Uitgegeven door Dr. N.J. Krom*. Batavia: Albrecht & Co.
- Budiati, Tinia. 1985. "Prasasti-Prasasti Masa Sindok sampai dengan Airlangga: Sebuah Kajian Unsur Penanggalan". Skripsi, Depok: Universitas Indonesia.
- Cahyani, Dilla Dwi, dan Mega Teguh Budiarto. 2020. "Etnomatematika: Eksplorasi Prasasti Peninggalan Kerajaan di Jawa Timur". *Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika* 4 (2): 673–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cendekia.v4i2.289>.
- Damais, Louis-Charles. 1955. "II. Etudes d'épigraphie indonésienne: IV. Discussion de la date des inscriptions". *Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient* 47 (1): 7–290. <https://doi.org/https://doi.org/10.3406/befeo.1955.5406>.
- Darmosoetopo, Riboet. 1998. "Hubungan Tanah Sima dengan Bangunan Keagamaan di Jawa pada abad IX-X TU". Disertasi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Fauzi, Ahmad Nurul. 2015. "Study Komparatif Peran Bengawan Solo dan Sungai Brantas dalam Perkembangan Ekonomi Abad Ke-10 M-15 M di Jawa Timur". *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah* 3 (3): 274–85. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/12389>.
- Ginanjar, Agi. 2018. "Efek Narasi Cagar Budaya pada Intensi dan Kebanggaan Remaja terhadap Majapahit dan Indonesia". *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya* 8 (1): 24–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.17510/paradigma.v8i1.154>.
- Griffiths, Arlo. 2020. "Rediscovering an Old Javanese Inscription: Mpu Mano's Donation in Favor of a Buddhist Dignitary in 888 Śaka". *Archipel*, No. 99 (Juli): 107–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.4000/archipel.1976>.
- Hardiati, Endang Sri. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid II: Zaman Kuno*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hardjowardojo, Pitono. 1961. *Sedjarah Indonesia Lama*. Malang: Lembaga Penertiban Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Haryono, Timbul. 1999. "Sang Hyang Watu Teas dan Sang Hyang Kulumpang: Perlengkapan Ritual Upacara Penetapan Sima pada Masa Kerajaan Mataram Kuna". *Humaniora* 11 (3): 14–21. <https://jurnal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/666>.
- Istari, Rita. 2015. "Prasasti Pendek dari Candi Sanggar dan Kemungkinan Penghormatan terhadap Dewa Brahma". *Berkala Arkeologi* 35 (1): 51–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.30883/jba.v35i1.38>.
- Jati, Slamet Sujud Purnawan, Blasius Suprpta, dan Sonny Wedhanto. 2014. "Eksplorasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Bangsa dari Sejarah Lokal Malang mulai Zaman Prasejarah sampai Masa Hindu-Buddha Abad XI". *Jurnal Sejarah dan Budaya* 8 (1): 83–95. <http://journal.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/article/view/4757>.

- Liebert, Gusta. 1976. *Iconographic Dictionary of the Indian Religions: Studies in South Asian Culture*. Leiden: E.J. Brill.
- Lutfillah, Novrida Qudsi, dan Eko Ganis Sukoharsono. 2013. "Historiografi Akuntansi Indonesia pada Masa Mataram Kuno (Abad VII-XI Masehi)". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, April. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2013.04.7183>.
- Mahmud, M. Irfan. 2014. "Komoditas dan Dinamika Perdagangan di Papua Masa Sejarah". *Berkala Arkeologi* 34 (2): 183–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.30883/jba.v34i2.24>.
- Maziyah, Siti. 2011. "Daerah Otonomi pada Masa Kerajaan Mataram Kuna: Tinjauan Berdasarkan Kedudukan dan Fungsinya". *Paramita: Historical Studies Journal* 20 (2): 117–28. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/paramita/article/view/1044>.
- Merton, Robert King. 1968. *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press.
- Moniz, Ariel. 2015. "The End of Days: Tales of Apocalypse Across Time and Space". *Hohonu* 13: 38–42. <https://hilo.hawaii.edu/campuscenter/hohonu/volumes/volume13-2015>.
- Munandar, Agus Aris. 2014. "Mitos dan Peradaban Bangsa". Dalam *Mitra Satata: Kajian Asia Tenggara Kuna*, 23–64. Jakarta: Wedatama Widyastra.
- Munandar, Agus Aris. 2017. "Tradisi Pemerintahan dan Konsep Raja Ideal Menurut Pandangan Masyarakat Sunda Kuna Abad Ke-13--16 M". Dalam *Siliwangi, Sejarah dan Kebudayaan Sunda Kuna*, 103–247. Jakarta: Wedatama Widyastra.
- Museum Nasional. 1985. *Prasasti Koleksi Museum Nasional Jilid I*. Jakarta: Proyek Pengembangan Museum Nasional 1985/1986.
- Pradita, Dennys, dan Adi Putra Surya Wardhana. 2021. "Menundukkan Kaum Pemburu: Kuasa Pu Sindok atas Perburuan Burung dan Binatang Abad X". *Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya*. 22 (1): 25–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.52829/pw.296>.
- Praptanto, Eko. 2010. *Sejarah Indonesia Zaman Kerajaan Kuno*. Jakarta: Bina Sumber Daya Mipa.
- Rahardjo, Supratikno. 2011. *Peradaban Jawa: dari Mataram Kuno sampai Majapahit akhir*. Depok: Komunitas Bambu.
- Sari, Windi Ika Diahing, dan Anjar Mukti Wibowo. 2017. "Prasasti Anjuk Ladang di Nganjuk Jawa Timur (Sejarah dan Potensinya sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah)". *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya* 7 (1): 82–103. <https://doi.org/http://doi.org/10.25273/ajsp.v7i01.1062>.
- Schrieke, Bertram Johannes Otto. 2016. *Kajian Historis Sosiologis Masyarakat Indonesia: Penguasa dan Kerajaan Jawa pada Masa Awal*. Disunting oleh Aditya Pratama. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. 2005. "Memahami Metode Kualitatif." *Makara Human Behavior Studies in Asia* 9 (2): 57–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>.
- Stuart, A. B. Cohen. 1875. *Kawi Oorkonden, Inleiding en Transcriptie*. Leiden: E. J. Brill.

- Susanti, Ninie. 2010. *Airlangga: Biografi Raja Pembaharu Jawa Abad XI*. Depok: Komunitas Bambu.
- Tjahjawulan, Indah, dan Adityayoga Gardjito. 2021. “Penyajian Koleksi Museum Sejarah dan Budaya Kota Malang”. *JSRW (Jurnal Senirupa Warna)* 7 (2): 87–106. <https://jsrw.ikj.ac.id/index.php/jurnal/article/view/110>.
- Turner, Jonathan H., dan Alexandra Maryanski. 2010. *Fungsionalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibowo, Agustinus Setyo. 2015. “Ratu Adil Jawa dan Ratu Filsuf Platon: Timbangan dan Aktualisasinya untuk Saat Ini”. Dalam *Ratu Adil, Kuasa, dan Pemberontakan di Nusantara*, disunting oleh Dorothea Rosa Herliany, Imam Muhtarom, Seno Joko Suyono, Wicaksono Adi, dan Yoke Darmawan, 14–43. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Widiah, Sri, dan Aminuddin Kasdi. 2018. “Studi Historis Prasasti Cunggurang sebagai Sumber Belajar Sejarah pada Masa Pu Sindok Tahun 929--947 M”. *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah* 6 (1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/22843>.
- Widiatmoko, Sigit, Heru Budiono, Nara Setya Wiratama, dan Gusti Garnis Sasmita. 2023. “Kajian Deskripsi Semiotika pada Pakaian Khas Kediri”. *Pinus: Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran* 8 (1): 81–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.29407/pn.v8i1.18861>.